

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2030

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Poros Palu – Palolo Kompleks Perkantoran
Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
PROVINSI SULAWESI TENGAH



#KEMENSOS
Hadir



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten SIGI Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati SIGI Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya berkenaan dengan RPJMD Kabupaten SIGI Tahun 2025-2029, dan prioritas nasional. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten SIGI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya Renstra Dinas Sosial Kabupaten SIGI Tahun 2025-2029, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten SIGI harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah, Renstra ini memberikan gambaran tentang kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif selama lima tahun kedepan. Harapannya semoga Renstra ini dapat menjadi acuan kerja yang efektif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten SIGI.

Sigi Kota, 30 September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIGI



ARIYANTO S STP

Pembina Tkt. I (IV/b)

Nip. 19820811 200112 1 001



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.4 Kelompok sasaran Pelayanan	26
2.1.5 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	36
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1 Tujuan & Sasaran Renstra Dinas social Kab Sigi Tahun 2025-2029	39
3.2 Strategis Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	43
3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kab. Sigi Tahun 2025-2029	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
4.1 Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial periode 2025-2030	46
4.2 Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030	51
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, taret dan pagu indikatif	85
4.4 Subkegiatan prioritas Dinas Sosial	107
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas sosial 2025-2029	110
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Sosial 2025-2029	111
BAB V PENUTUP	113



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial	13
Tabel 2.2	Jumlah ASN Dinas Sosial	21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sigi Berdasarkan Pangkat Golongan	22
Tabel 2.4	Perlengkapan (Sarana Prasarana) Dinas Sosial	23
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sigi	24
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sigi	24
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah DINAS SOSIAL Kabupaten Sigi	25
Tabel 2.8	jenis Pelayanan Bantuan yang dikelola Dinas Sosial	32
Tabel 2.9	Teknik menyimpulkan Isu strategis Dinas Sosial	37
Tabel 3.1	teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran renstra PD	39
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030	40
Tabel 3.3	Tujuan , sasaran dan Indikator Dinas Sosial tahun 2025-2029	42
Tabel 4.1	Program dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.2	Tehnik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	53
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan Dinas sosial tahun 2025-2029	86
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029	108
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial	111
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan sosial daerah. Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

Dinas Sosial adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kompleksitas paling tinggi. Dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya, jumlah sasaran, sumberdaya manusia (seluruh penduduk dalam kabupaten), Dinas Sosial menangani banyak urusan wajib di bidang Sosial, mulai dari perencanaan program yang kompleks, pendataan peninjauan lapangan, penanganan program, pemberian/penyaluran bantuan, pendampinga program, hingga penanganan kasus yang berkaitan dengan segi sosial kemanusiaan guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang beradab, beradat, bersaing, produktif dan berkeadilan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan

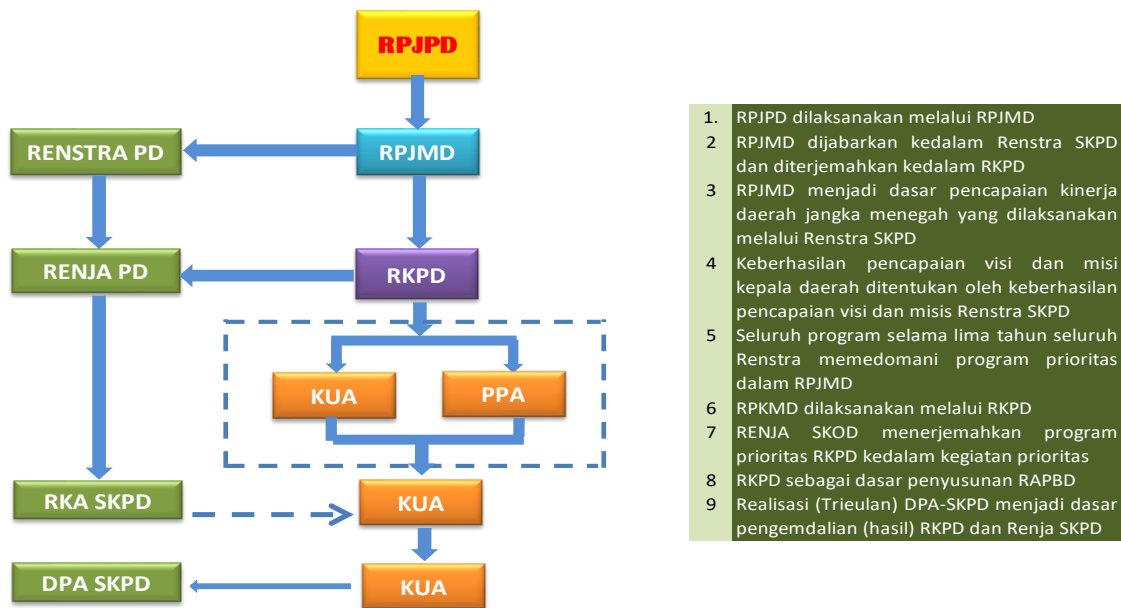




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini:



1. RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD
2. RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD
3. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD
4. Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi dan mision Renstra SKPD
5. Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD
6. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD
7. RENJA SKPD menerjemahkan program prioritas RKPD kedalam kegiatan prioritas
8. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD
9. Realisasi (Trieulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD

Dokumen Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Sigi.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025–2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Sig untuk mewujudkan good governance melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sig Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Sosial dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sigi untuk periode 2025-2029 berfokus pada penyelarasan visi, misi,





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

tujuan, dan program kegiatan sosial yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi. Sesuai Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sigi sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sigi

Gambaran dari Visi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 tersebut, Visi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, yaitu :

**“ KABUPATEN SIGI, BERKELANJUTAN BERBASIS
PERTANIAN DAN PARIWISATA ”**

Dengan mempertimbangkan kesepakatan di atas dan mencermati berbagai prestasi pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan, maka dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**1. MEWUJUDKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LAYANAN
INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKEADILAN.**

Merupakan upaya dalam peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, perumahan layak bagi masyarakat miskin dan menerapkan praktik infrastruktur ramah lingkungan dan berwawasan pembangunan hijau yang berkelanjutan serta menjamin ketersediaan jaringan telekomunikasi dipelosok.

2. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEJAHTERA

Merupakan upaya dalam Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter, dan berdaya saing dalam peningkatan kualitas, pengetahuan, ketrampilan bagi masyarakat luas. SDM yang berkualitas merupakan pondasi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

3. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

Membangun ekonomi yang berdaya saing dengan mendorong inovasi kewirausahaan, pertanian dan pariwisata.

4. MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN BENCANA DAN HARMONI SOSIAL

Merupakan upaya dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mengurangi resiko bencana. Melanjutkan perlindungan sosial dengan masagena plus serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATI

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance dalam semua aspek pelayanan public melalui partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sigi terkait dengan misi ke- 2 yaitu **MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEJAHTERA** yang memiliki tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat diukur dari pencapaian Tingkat Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka dan Indeks Gini kabupaten Sigi sebagai indikator kinerjanya yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.
4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
5. Meningkatnya kesejahteraan transmigran





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Gambar : 1.1 Tujuan Sasaran Perangkat daerah

TUJUAN STRATEGIS	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang Inklusif				
INDIKATOR STRATEGIS	Indeks Kesejahteraan Sosial				
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya pemberdayaan sosial melalui PPKS	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial melalui PPKS	Meningkatnya kualitas pelayanan Sosial bagi PPKS	Meningkatkan pembinaan kelembagaan melalui PPKS	Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan
INDIKATOR SASARAN	<i>Persentase keluarga miskin yang meningkat ekonominya secara mandiri (%)</i>	<i>Persentase keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)</i>	<i>Persentase Layanan Sosial bagi PPKS (%)</i>	<i>Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS (%)</i>	<i>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)</i>
BIDANG	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENAGANAN FAKIR MISKIN	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENAGANAN FAKIR MISKIN	BAGIAN SEKRETARAIAT
					

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi tahun 2021-2026 adalah :

- Menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan sosial yang responsif terhadap permasalahan sosial di Kabupaten Sigi, seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Memudahkan jajaran aparatur Dinas Sosial memahami dan menilai arah kebijakan serta program kegiatan operasional tahunan dalam periode lima tahun.
- Menjabarkan visi, misi, kebijakan, dan program daerah terkait sosial untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, dan profesional berdasar pada indikator kinerja.
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) agar perencanaan lebih terarah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

1.4. Sistimatik Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Pendahuluan*
- 1.2. Landasan Hukum*
- 1.3. Maksud dan Tujuan*
- 1.4. Sistimatik penyusunan Renstra*

- **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah*
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah*
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan*
- 2.5. Permasalahan layanan Perangkat daerah*
- 2.6. Isu Strategis Perangkat Daerah*

- **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas social Kabupaten Sigin Tahun 2025-2029*
- 3.2. Strategis Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029*
- 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029*

- **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program Dinas Sosial Kabupaten sigi Sigi Tahun 2025-2029*
- 4.2. Uraian Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten sigi Sigi Tahun 2025-2029*



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) **DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030**

*4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029*

*4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas
sosial 2025-2029*

*4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas
Sosial 2025-2029*

• **BAB V : PENUTUP**





BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Sigi memiliki struktur organisasi yang komprehensif dan fungsi yang luas untuk melayani kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana implementasi ASTACITA Ke Enam Presiden RI yaitu **"Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi"**.

Dasar hukum dan regulasi yang mengatur bidang sosial dan kemiskinan di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
4. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang Sosial.
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sigi menyediakan berbagai layanan publik dan dukungan kesejahteraan sosial yang meliputi:

1. Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Bencana Penyaluran bantuan sosial langsung, pembagian logistik bencana, perlindungan kelompok rentan (lansia, anak terlantar, disabilitas), layanan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), serta penyaluran hunian tetap untuk korban bencana.
2. Penanganan Kemiskinan Penguatan program pengentasan kemiskinan, pelaksanaan verifikasi data DTKS untuk akurasi bantuan, serta koordinasi lintas OPD dalam penanganan stunting dan penurunan kasusnya.
3. Program Khusus Program inovatif seperti "Sigi Masagena" di bidang kesehatan masyarakat kurang mampu, bantuan pangan, dan dukungan rehabilitasi sosia





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

4. Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial SPM Bidang Sosial adalah standar minimum layanan wajib yang harus diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat rentan (PMKS & korban bencana) agar kebutuhan dasarnya terpenuhi secara cepat, tepat, dan terukur, sesuai amanat undang-undang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sigi termasuk dalam golongan Perangkat Daerah Tipe B. Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Sigi terdiri dari 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) seksi serta Kelompok jabatan Fungsional dan 1 Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DINAS SOSIAL Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesejahteraan Masyarakat serta pelayanan Mutu terintegrasi di daerah.

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Susunan organisasi Dinas Sosial sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana
- c. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial



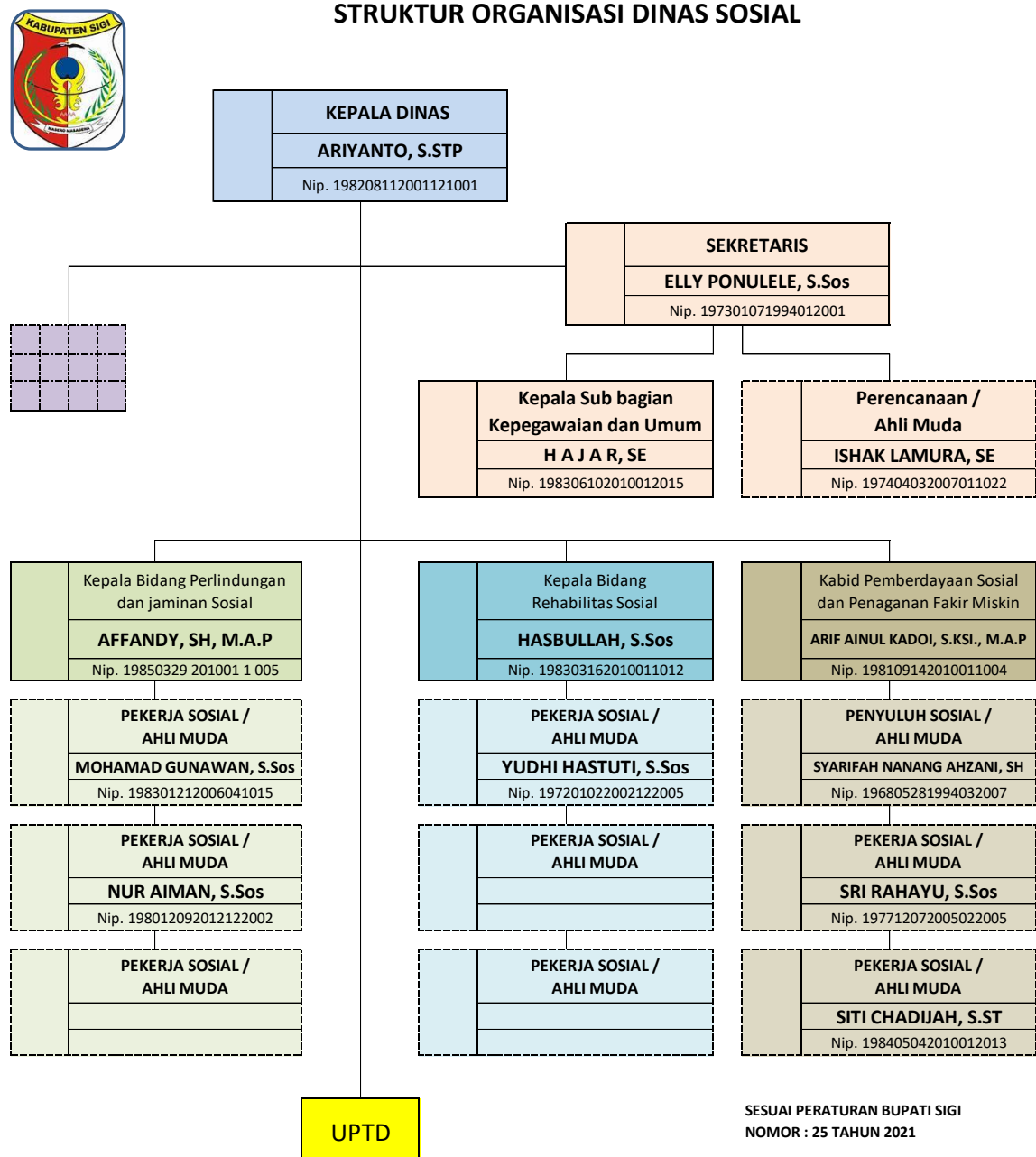


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial,
- f. Staf / Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksana

TABEL 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas di bidang Sosial.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya. Dinas Sosial Kabupaten Sigi terdiri dari

- a. Bagian Sekretariat
- b. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin,
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a.** Perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b.** Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- c.** Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d.** Pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e.** Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f.** Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- g.** Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barangmilik negara/daerah;
- h.** Pengelolaan urusan kepegawaian;
- i.** Pengelolaan data dan informasi;
- j.** Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;
- k.** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;
- l.** Pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum; dan
- m.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bagian Sekretariat ada 2 (dua) Sub bagian terdiri dari :

- a.** Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas :
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial;
 - Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

keuangan;

- Pemeliharaan dan Penyimpanan bukti dan dokumen Keuangan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- Penyiapan bahan dan Penyusunan Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan
- Penyiapan bahan dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Aset;
- Penyiapan Bahan Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan Sosial;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas :

- Pelaksanaan Urusan Surat Masuk dan Keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, Pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan;
- Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

restitusi pengobatan dan lain-lain;

- Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
- Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan social dan penaganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan sosial dan Penaganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial; pemberian petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

- pengembangan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- d.** pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
 - e.** penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
 - f.** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g.** pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ada 3 (tiga) Seksi/Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

4. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a.** Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok seperti anak-anak, penyandang disabilitas, tuna sosial (gelandangan, pengemis, eks narapidana, dan lainnya), lanjut usia, korban perdagangan orang, serta korban tindak kekerasan.
- b.** Memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- c.** Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk program rehabilitasi sosial.
- d.** Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin sinergi dalam pelaksanaan program.
- e.** Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

- f.** Melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan yang terkait dengan fungsi rehabilitasi sosial.
- g.** Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- h.** Penyusunan program kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial.
- i.** Pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan serta rehabilitasi sosial.
- j.** Inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- k.** Koordinasi dan sinkronisasi antar unit dan instansi terkait.
- l.** Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- m.** Melaksanakan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

5. Bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi

- a.** Merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- b.** Menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- c.** Melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam dan sosial.
- d.** Melaksanakan identifikasi, asesmen, penjangkauan, konsultasi, konseling, dan intervensi psikososial.
- e.** Memelihara perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga
- f.** Memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta koordinasi dengan unit atau instansi terkait.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

- g.** Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a.** Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b.** Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- c.** Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- d.** Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e.** Jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- f.** Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tata kerja kelompok jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit organisasi maupun antar satuan organisasi serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil

Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Sosial

No	Staus kepegawaian	Laki-laki	perempuan	jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15	14	29
2	Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS)	2		2
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	10	9	19
4	Tenaga Kontrak	5		5
	Jumlah	32	23	55

Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 55 orang, terdiri dari 32 laki-laki (55%) dan 23 perempuan (35%). Komposisi ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan Dinas Sosial ini.

Berdasarkan jenjang pendidikan formal khusus PNS dapat dirinci sebagai berikut :

1. SMU atau Sederajat 11 Orang
2. Sarjana Strata I (SI) 18 Orang
3. Sarjana Strata II (S2) 2 Orang

Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai berikut

1. Golongan II 11 Orang
2. Golongan III 18 Orang
3. Golongan IV 2 Orang

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sigi
Berdasarkan Pangkat Golongan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

No	Status Pegawai	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
	Golongan IV			
	IV/b	1		1
	IV/a		1	1
	Golongan III			
	III/d	4	7	11
	III/c	1	1	2
	III/b			
	III/a	4	1	5
	Golongan II			
	II/d	1		1
	II/c	5	1	6
	II/b	3	1	4
	II/a			
		19	12	31

Pada Tabel 2.3, Golongan III merupakan golongan yang paling dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di tahap menengah karir. Lebih rinci, mayoritas pegawai berada di Golongan III/D (30,77%), menandakan banyak pegawai telah mencapai ujung golongan ini dan menunggu promosi ke Golongan IV.

2. Perlengkapan (Sarana Prasarana) Dinas Sosial

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada Tabel 2.4.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Tabel 2,4 Perlengkapan (Sarana Prasarana) Dinas sosial

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi				Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Rusak	Hilang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.C. Split	unit	10	-	-	-	10
2	A.C. Window	unit	-	-	-	-	-
3	Spiker Aktif	unit	4	-	-	-	4
4	Kipas Angin	unit	2	-	1	-	3
5	Focusing Screen/Layar LCD Projector	unit	1	-	1	-	2
6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	-	-	-	-	-
7	Alat Studio Video Lainnya	unit	1	-	-	-	1
8	Amplifier	unit	-	-	-	-	-
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	-	-	-	1
10	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	unit	-	-	-	-	-
11	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	unit	1	-	-	-	1
12	Battery Charge	unit	-	-	-	-	-
13	Brandkas	unit	-	1	-	-	1
14	Camera film	unit	1	-	-	-	1
15	Camera Video	unit	-	-	-	-	-
16	CPU (Peralatan Personal Komputer)	unit	1	-	-	-	1
17	Digital Audio Taperecorder	unit	-	-	-	-	-
18	Dispenser	unit	3	-	-	-	3
19	External/ Portable Hardisk	unit	-	-	-	-	-
20	Facsimile	unit	-	-	-	-	-
21	Filing Cabinet Besi	unit	-	-	-	-	-
22	Focusing Screen/Layar LCD Projector	unit	1	-	1	-	2
23	Genset	unit	1	-	-	-	1
24	Komputer Unit Lainnya	unit	4	-	-	2	6
25	Kursi Kayu	unit	-	-	-	-	-
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	unit	1	-	-	-	1
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit	3	-	2	-	5
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	unit	-	-	-	-	-
29	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	20	5	5	-	30
30	Kursi Lipat	unit	-	-	-	-	-
31	Kursi Putar	unit	2	1	3	-	6
32	Kursi Rapat Pejabat lainnya	unit	5	4	4	-	13
33	Kursi Tamu	unit	2	-	-	-	2
34	Lap Top	unit	10	2	2	3	17
35	Lemari Arsip Pejabat lainnya	unit	4	-	4	-	8
36	Lemari Besi/Metal	unit	-	1	-	-	1
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	unit	4	2	1	-	7
38	Lemari Es	unit	1	-	-	-	1
39	Lemari Kayu	unit	-	1	-	-	1
40	Loudspeaker	unit	-	-	-	-	-
41	Meja 1/2 Biro	unit	1	-	-	-	1
42	Meja Kerja Kayu	unit	10	3	2	-	15
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	unit	6	2	2	-	10
44	Meja Rapat	unit	1	-	-	-	1
45	Mesin Absensi	unit	1	-	-	-	1
46	Mesin Pemotong Rumput	unit	-	-	-	-	-
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	unit	1	-	-	-	1
48	Microphone/Wireless MIC	unit	-	-	-	-	-
49	P.C Unit	unit	-	-	-	-	-
50	Peralatan Jaringan lainnya	unit	-	-	-	-	-
51	Peralatan Minikomputer lainnya	unit	2	-	-	-	2
52	Peralatan Personal Komputer lainnya	unit	-	-	-	-	-
53	peralatan studio audio lainnya (dst)	unit	2	-	-	-	2
54	Personal Komputer lainnya	unit	-	-	-	-	-
55	Sepeda Motor	unit	-	-	-	-	-
56	Serial Scanner/Printer	unit	15	3	1	1	20
57	Server	unit	4	-	-	-	4
58	Sofa	unit	-	-	-	-	-
59	Sound System	unit	2	-	-	-	2
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	unit	-	-	-	-	-
61	Tangga Aluminium	unit	1	-	-	-	1
62	Telephone Mobile	unit	1	-	-	-	1
63	Televisi	unit	-	-	-	-	-
64	Tiang Bendera	unit	2	1	1	-	4
65	Treng Air/Tandon Air	unit	-	-	-	-	-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai kinerja Dinas Sosial sesuai dengan peraturn Menteri Kesejahteraan Sosial No. 8 tahun 2012 berdasarkan 2 (Dua) Sasaran yaitu PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sosial

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Sosial Kabupaten Sigi menyusun dan menyajikan capaian kinerja serta capaian anggaran secara periodik seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. sebagai berikut :

table 2,5

**Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Sigi**

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Masyarakat miskin	%	N/A	5,04	5,13	5,21	N/A	4,23	4,87	5,00	N/A	83,93	94,93	95,97
2	Presentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	%	N/A	11,15	11,35	11,67	N/A	8,21	10,64	11,23	N/A	73,63	93,74	96,23
3	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	%	N/A	8,7	8,90	9,02	N/A	6,4	8,49	8,79	N/A	73,56	95,39	97,45
4	Indeks penanganan korban pasca bencana	Inderks	N/A	40	40	40	N/A	40	40	40	N/A	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Rehabilitas bagi korban bencana	Inderks	N/A	30	30	30	N/A	30	30	30	N/A	100,00	100,00	100,00

Table 2.6

**Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Sigi**

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	N/A	100	100	100	N/A	81,67	100,00	100,00	N/A	96,55	96,21	97,47
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	N/A	100	100	100	N/A	7255	100,00	100,00	N/A	96,74	95,98	98,52
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	N/A	100	100	100	N/A	71,89	100,00	100,00	N/A	95,89	97,53	98,36
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gepeng Terlantar di Luar Panti	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Table 2.7
Pagu Anggaran dan Realisasi pendanaan Perangkat Daerah
DINAS SOSIAL Kabupaten Sigi

No	PROGRAM	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.034.651.469	2.914.740.408	3.370.584.460	2.828.900.306
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	145.553.885	220.714.592	453.803.043	139.408.800
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.400.000	5.340.000	-	-
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.811.860.388	936.526.788	5.643.920.818	8.746.912.444
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	125.158.713	733.219.000	2.200.000.000	-
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	88.500.425	330.138.497	-	-

PROGRAM	Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (Rp)				
	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	2.874.590.037	3.224.746.961	2.732.774.389	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	N/A	220.341.329	442.536.145	134.363.586	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN TINDAK KEKERASAN	N/A	5.340.000	N/A	N/A	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	N/A	873.459.107	5.395.464.187	8.670.650.511	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	N/A	697.462.000	2.194.828.000	N/A	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	N/A	330.138.497	N/A	N/A	N/A

PROGRAM	Presentase Anggaran Pada Tahun ke (Rp)				
	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	98,62	95,67	96,60	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	N/A	99,83	97,52	96,38	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN TINDAK KEKERASAN	N/A	100,00	N/A	N/A	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	N/A	93,27	95,60	99,13	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	N/A	97,79	99,76	N/A	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Kabupaten Sigi adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan serta Penerima manfaat. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. beberapa kriteria terhadap masyarakat miskin sebagai berikut :
 - Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan
 - Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
 - Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya
 - Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental, beberapa kriteria terhadap disabilitas sebagai berikut :
 - Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

sehari-hari.

- Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilit

3. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga, beberapa kriteria terhadap Anak Terlantar sebagai berikut :

- Berasal dari keluarga fakir miskin
- Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
- Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga).
- Anak yang putus sekolah dan

4. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun social, beberapa kriteria terhadap Lanjut Usia sebagai berikut :

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
- Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.

5. Korban Bencana Alam dan social adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran, konflik antar





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

kelompok dan antar komunitas masyarakat beberapa kriteria terhadap korban bencana sebagai berikut :

- sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. beberapa kriteria terhadap korban bencana sebagai berikut :
- Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
 - Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
 - Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.
 - Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
 - Peralatan dan teknologinya sederhana.
 - Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
 - Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.
7. Program Penanggulangan Stunting
- * Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan **beberapa desa sebagai lokus percepatan penurunan dan penanggulangan stunting**. Pada tahun 2025 ada **30 desa** yang menjadi fokus utama kegiatan ini, misalnya Maranata, Sidondo III, Bora, Wugaga, Dombu, Panasibaja, Matantimali, Lemosiranindi, dan lain-lain. Penetapan lokus





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) **DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030**

- * Pendampingan Keluarga Sasaran 1.000 HPK
Pendamping PKH berperan langsung mendampingi **Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** yang memiliki:
 - Ibu hamil
 - Ibu nifas dan menyusui
 - Bayi dan balita usia 0–59 bulanPendamping memastikan KPM **memenuhi komitmen kesehatan**, seperti pemeriksaan kehamilan rutin, imunisasi, penimbangan balita di Posyandu, serta pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai standar gizi.
- Pendamping PKH melaksanakan **P2K2/FDS (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga)** dengan materi:
 - Pencegahan stunting
 - Gizi seimbang ibu hamil dan balita
 - Pola asuh anak
 - Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)Edukasi ini bertujuan mendorong **perubahan perilaku keluarga**, tidak hanya mengandalkan bantuan tunai, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan gizi. berguna untuk memusatkan intervensi di wilayah dengan prevalensi tinggi
- Pendamping PKH membantu:
 - Mengidentifikasi balita berisiko stunting
 - Memantau status gizi anak KPM
 - Memutakhirkan data melalui sistem PKH dan koordinasi dengan kader Posyandu serta PuskesmasData ini penting sebagai **dasar intervensi spesifik** dan penentuan lokus stunting di desa.
- Pendamping PKH berperan sebagai **penghubung lintas sektor**, antara lain:
 - Dinas Sosial





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

- Dinas Kesehatan
- Pemerintah Desa
- Kader Posyandu dan KPM

Peran ini mendukung **konvergensi penanganan stunting**, sehingga bantuan sosial, layanan kesehatan, dan program desa saling terintegrasi.

8. Beberapa jenis dan klasifikasi PPKS yang ditangani dinas sosial Kabupaten sigi sebagai berikut :

a. Dinas Sosial Kabupaten Sigi menangani 19 Jenis PPKS dari 26 jenis yang ada sebagai berikut Yaitu :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
5. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diperlukan salah
6. Lanjut Usia Terlantar
7. Penyandang Disabilitas
8. Tunas Susila
9. Bekas warga Binaan Lembaga Pemsyarakatan (BWBLP)
10. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
11. Korban penyalagunaan NAPA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
12. Korban tindak kekerasan
13. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)
14. Korban Bencana Alam
15. Korban bencana sosial
16. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
17. Fakir Miskin (FM)
18. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

19. Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Terdiri atas 12 jenis dan tersebar di 15 Kecamatan yaitu;
 1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 2. Pekerja Sosial Profesional (PSP)
 3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 5. Karang Taruna (KT)
 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 7. Keluarga Pioner (KP)
 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
 10. Penyuluh Sosial (PS)
 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 12. Dunia Usaha

Kinerja penanganan fakir miskin yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Sigi diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Program pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan bantuan sementara tetapi juga mendorong masyarakat agar berdaya secara ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
2. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menysasar keluarga miskin dengan berbagai kategori bantuan sesuai kebutuhan, misalnya untuk ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas, dan lansia.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga miskin.
 4. Pelaksanaan program terpadu percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan berbasis perangkat daerah, seperti program "Tangguh Bersinar" yang melibatkan bantuan modal usaha dan makanan tambahan bagi keluarga penerima manfaat di desa-desa binaan.
 5. Sosialisasi dan pemasangan penanda rumah penerima bantuan **sosial** untuk memastikan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan serta memudahkan pendataan dan monitoring.
 6. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kemiskinan, termasuk pelibatan pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan dan perlindungan sosial.
9. Dengan pendekatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sigi berupaya mewujudkan penanganan fakir miskin yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayahnya.

2.1.5 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

- b. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial
- d. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana di wilayah Kabupaten Sigi.
- e. Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
- f. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.

Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Sigi sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Table : 2.8
Jenis Pelayanan bantuan yang di kelola Dinas Sosial

No	JENIS LAYANAN	SASARAN
1	2	3
1	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DTKS	1 Masyarakat Miskin yang tidak masuk dalam DTKS/DTSN
2	PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI SIGI MASAGENA	1 Memfasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 2 Telah menjadi peserta JKN, tetapi manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung 3 pengurusan rekomendasi bea siswa pendidikan terhadap masyarakat miskin
3	Penanganan Orang Miskin, Rentan dan bantuan sosial	1 Penyandang Disabilitas 2 Anak terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 4 Anak Yatim Piatu
4	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	1 Anak Korban / Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum 2 Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

No	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
1	2	3	4	5
1	KPM PKH	APBN	Masyarakat Miskin	Masuk dalam DTKS/DTSEN
2	Bantuan Sosial KUBE dan UEP	APBD	Kelompok Masyarakat dan Individu	Masuk dalam DTKS/DTSEN
3	Bantuan ATENSI	APBN	Disabilitas	Masuk dalam DTKS/DTSEN
			Anak	
			Lanjut usia	
4	Permakanan dan Sandang	APBD	Disabilitas	Masuk dalam DTKS/DTSEN
			Anak	
			Lanjut usia	
			Fakir Miskin	

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan kemajuan bidang kesejahteraan sosial, disadari pula bahwa keberhasilan ternyata masih diwarnai permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Hal ini masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan, baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak nonsosial, yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi antara lain:

1. Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara jumlah maupun kompleksitasnya;
2. Terbatasnya sumber daya manusia, terutama tenaga pendamping yang memadai dan merata di seluruh wilayah
3. Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;
4. Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Ketidakakuratan data penerima manfaat (KPM) yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Data yang tidak selalu diperbarui seiring perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan adanya kesulitan geografis serta aspek sosial budaya menjadi faktor penyebabnya.
6. Ketergantungan ekonomi tinggi terhadap bantuan sosial sehingga belum berhasil mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara efektif.
7. Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;
8. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat;
9. Masalah kerawanan sosial yang sering terjadi antar desa/kampung dengan penyebab yang kadang hanya masalah kecil tetapi selalu dibesar-besarkan.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

10. Sering terjadinya bencana alam, terutama tanah longsor, banjir bandang dan gempa bumi.
11. Keterbatasan anggaran dan dana pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 terutama berkaitan dengan penanganan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program yang mendukung pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial. Beberapa isu penting yang diangkat mencakup penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), peningkatan produktivitas dan partisipasi masyarakat miskin, serta penguatan kelembagaan sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial lokal.

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam RPJMD tersebut meliputi:

- Penyusunan rencana strategis yang terintegrasi dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Fokus pada penguatan ketahanan sosial dan perlindungan sosial, terutama kepada kelompok rentan, melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sosial.
- Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan petani, termasuk masyarakat adat, dengan dukungan program ekonomi inklusif dan pembangunan infrastruktur tahan gempa di daerah rawan bencana.
- Integrasi program sosial dengan pembangunan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan transformasi digital guna mempercepat peningkatan kualitas hidup warga.
- Partisipasi aktif dalam forum perangkat daerah untuk menyamakan persepsi, evaluasi dan koordinasi program, serta sinergi antar





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

perangkat daerah sehingga RPJMD dapat tersusun berbasis data dan kebutuhan lokal.

Dinas Sosial juga berorientasi meningkatkan ketahanan sosial masyarakat melalui pembangunan karakter, pelestarian nilai kearifan lokal, serta penguatan institusi sosial demi mendukung visi pembangunan Kabupaten Sigi yang berfokus pada pertanian berbasis konservasi sumber daya alam dan budaya, isu strategis serta strategi Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam RPJMD 2025-2029 menitikberatkan pada upaya pemberdayaan sosial dan mitigasi ketimpangan sosial, sambil mempertahankan nilai-nilai sosial budaya lokal sebagai penyangga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dijalankan diarahkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas dan memperkuat ketahanan sosial.

Identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan strategis pada tingkat global, nasional, dan regional, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya, termasuk Rancangan Awal RPJMD 2025 2029 dan Laporan KLHS RPJMD 2025–2029. isu strategis Dinas Sosial mengacu pada bagaimana dampak sosial dari kebijakan pembangunan dapat terkelola dengan baik agar tidak mengancam kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat.

Beberapa isu strategis Dinas Sosial dalam laporan KLHS RPJMD yang umumnya diidentifikasi meliputi:

1. Penanganan dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), disabilitas, lansia, dan anak-anak yang memerlukan pendampingan.
2. Penguatan pemberdayaan sosial dan produktivitas masyarakat miskin agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
3. Pelestarian nilai sosial budaya, kearifan lokal, dan solidaritas sosial sebagai penopang ketahanan sosial masyarakat.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

4. Perlindungan sosial terhadap dampak negatif pembangunan dan bencana, termasuk mitigasi risiko sosial akibat perubahan lingkungan atau ekonomi.
5. Integrasi data dan sistem informasi kesejahteraan sosial untuk peningkatan efektivitas pelayanan dan monitoring kondisi sosial masyarakat.
6. Pengembangan kebijakan sosial yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan yang terjadi selama pelaksanaan RPJMD.
7. Program Sekolah Rakyat dinilai memiliki efektivitas yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan antar generasi, melalui pendidikan berkualitas dan gratis yang terfokus pada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat merupakan strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan absolut dengan memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi dan sosial. Program ini juga memberikan pendampingan sosial dan akses kepada berbagai bantuan sosial yang membantu kesejahteraan keluarga siswa secara keseluruhan, seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial PKH, sembako, dan pemberdayaan ekonomi di komunitas mereka.

Tabel 2.9 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KHLS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Minimnya pelibatan masyarakat inklusi	Data penerima bantuan sosial yang tidak valid dan tidak update,	Penguatan peran masyarakat inklusi dalam pembangunan sosial	Kemiskinan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Masyarakat miskin yang kekurangan akses terhadap sumber daya yang berkelanjutan.	Arah RPJMN 2025–2029 dan Ketidakmerataan pembangunan dan layanan publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat inklusi.	Representasi kelompok rentan masih terbatas, Basis data tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota,	Penguatan peran masyarakat inklusi dalam pembangunan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

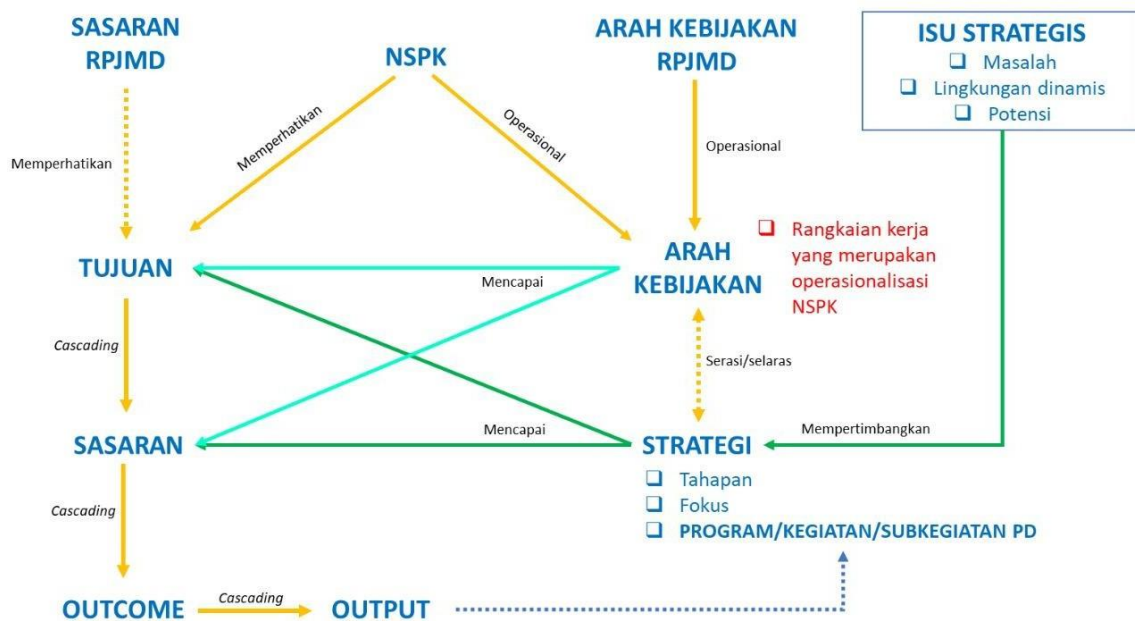
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstras Dinas Sosial Kabupaten Sigi periode 2025-2029

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2026-2030. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030.

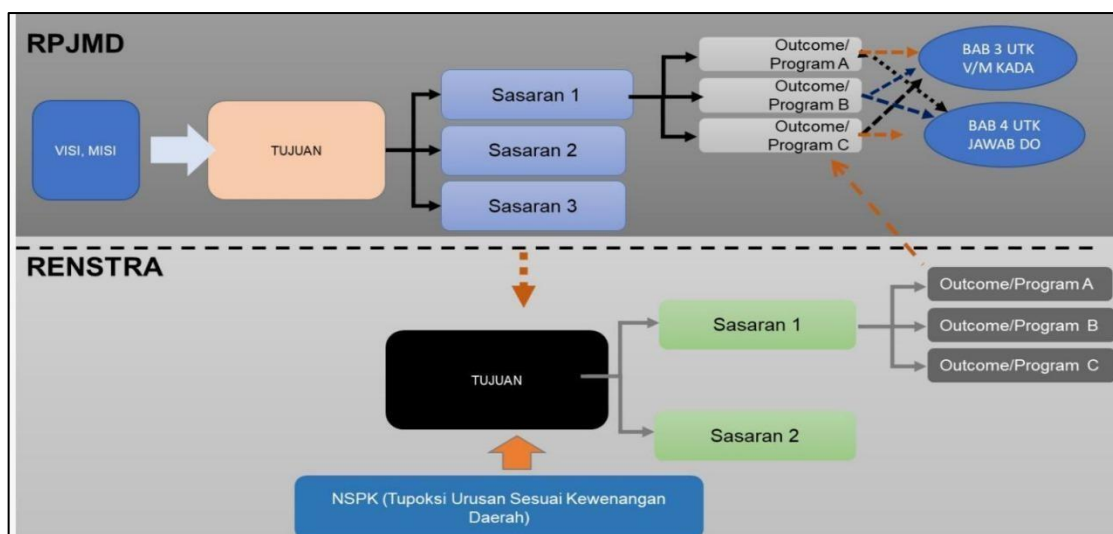
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Gambar 3.2 Karangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah



Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang SIGI MASAGENA Perda Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	71	71,71	72,43	73,15	73,88	74,62	
		Meningkatnya Pemberdayaan, Sosial melalui PPKS	Persentase Keluarga miskin yang terpenuhi Kebutuhannya	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial melalui PPKS	Persentase Keluarga yang terpenuhi kebutuhannya	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial Bagi PPKS	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan Pembinaan kelembagaan melalui PSKS	Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	%	100	100	100	100	100	100	

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Memberdayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara menciptakan peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

santunan dan bantuan bagi Fakir Miskin, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Yatim Piatu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya, memberikan bimbingan sosial dan keterampilan untuk Penyandang Cacat (PACA), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Tuna Susila (WTS), Eks korban bencana, Gepeng dan Anak Nakal bagi kemandirian hidup serta penanggulangan bencana.

Berikut adalah tabel penahapan strategi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030.

Tabel 3.2 Penahapan Strategi Dinas SOSIAL Kabupaten Sigi
Renstra Tahun 2025-2029

TAHAP 1 2026	TAHAP 1 2027	TAHAP 1 2028	TAHAP 1 2029	TAHAP 1 2030
Pemetaan dan identifikasi kelompok masyarakat rentan di Kabupaten Sigi, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, KAT serta kebutuhan mereka dalam hal pendidikan, keterampilan, dan layanan sosial.	Penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan keterampilan untuk kelompok rentan di wilayah Kabupaten Sigi, termasuk keterampilan kerja, kewirausahaan, dan keterampilan teknis yang relevan dengan potensi lokal.	Memperluas akses pendidikan untuk kelompok rentan, terutama anak perempuan dan penyandang disabilitas, dengan menyediakan fasilitas pendidikan inklusif dan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin.	Meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan untuk masyarakat rentan, dengan membangun fasilitas layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan memperkuat program bantuan sosial.	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan program pemberdayaan berdasarkan dampak yang terukur terhadap kesejahteraan kelompok rentan, serta memperkuat kebijakan dan kemitraan untuk memastikan keberlanjutan program.

Untuk mencapai visi dan misi, Dinas Sosial Kabupaten Sigi menerapkan strategi dan kebijakan sebagaimana pada table 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5.
Arah Kebijakan Renstra tahun 2025-2029

OPRASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang SIGI MASAGENA dan Perda Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Kelompok Marginal melalui program pemberdayaan untuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dengan menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan, serta akses ke layanan sosial yang lebih baik Memperkuat program perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin, dengan menyediakan jaminan kesehatan universal melalui BPJS Kesehatan, serta meningkatkan akses pada pendidikan gratis dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan klinik berbasis komunitas yang dapat diakses oleh masyarakat miskin di seluruh Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Kelompok Marginal melalui program pemberdayaan untuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dengan menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan, serta akses ke layanan sosial yang lebih baik Memperkuat program perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin, dengan menyediakan jaminan kesehatan universal melalui BPJS Kesehatan, serta meningkatkan akses pada pendidikan gratis dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan klinik berbasis komunitas yang dapat diakses oleh masyarakat miskin di seluruh Kecamatan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Jumlah total penduduk miskin (Desil 1–5): 168.688 jiwa dari total 280.708 jiwa ($\approx 60,1\%$ penduduk). Jumlah keluarga miskin (Desil 1–5): 54.325 KK dari total 99.277 KK ($\approx 54,7\%$ KK). Kecamatan dengan kemiskinan tertinggi (jiwa): 1. Sigi Biromaru – 29.291 jiwa 2. Palolo – 22.104 jiwa 3. Dolo – 16.514 jiwa sedangkan Kecamatan dengan kemiskinan terendah (Jiwa) : 1. Lindu – 4.318 jiwa 2. Marawola Barat – 4.981 jiwa 3. Nokilalaki – 3.822 jiwa dapat dilihat pada table berikut ini:

Peta kemiskinan berdasarkan Desil

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desil 1 (KK/Jiwa)	Desil 2 (KK/Jiwa)	Desil 3 (KK/Jiwa)	Desil 4 (KK/Jiwa)	Desil 5 (KK/Jiwa)	Total KK Miskin (Desil 1–5)	Total Jiwa Miskin
1	Sigi Biromaru	22.539	64.269	1.719 / 5.833	1.615 / 5.297	1.589 / 5.107	2.036 / 6.159	2.323 / 6.895	9.282	29.291
2	Palolo	11.381	31.741	1.698 / 5.369	1.307 / 4.072	1.509 / 4.610	1.438 / 4.134	1.407 / 3.919	7.359	22.104
3	Nokilalaki	2.253	6.262	325 / 1.043	236 / 749	218 / 685	229 / 694	226 / 651	1.234	3.822
4	Lindu	2.076	6.261	283 / 1.030	267 / 926	254 / 817	256 / 810	253 / 735	1.313	4.318
5	Kulawi	6.078	16.657	978 / 3.216	888 / 2.770	870 / 2.596	738 / 2.083	664 / 1.754	4.138	12.419
6	Kulawi Selatan	3.568	10.200	628 / 2.131	418 / 1.321	381 / 1.204	396 / 1.201	340 / 1.037	2.163	6.894
7	Pipikoro	3.511	9.604	1.093 / 3.410	645 / 1.891	496 / 1.432	367 / 991	262 / 674	2.863	8.398
8	Gumbasa	4.886	13.505	506 / 1.690	446 / 1.509	516 / 1.795	560 / 1.697	578 / 1.690	2.606	8.381
9	Dolo Selatan	6.165	17.808	983 / 3.517	814 / 2.735	801 / 2.539	775 / 2.287	722 / 2.048	4.095	13.126
10	Tanambulava	3.642	10.095	339 / 1.068	358 / 1.194	460 / 1.441	463 / 1.396	517 / 1.449	2.137	6.548
11	Dolo Barat	5.715	15.957	516 / 1.694	507 / 1.753	684 / 2.279	714 / 2.181	769 / 2.183	3.190	10.090
12	Dolo	9.598	27.251	714 / 2.270	855 / 2.943	1.108 / 3.831	1.190 / 3.598	1.346 / 3.872	5.213	16.514
13	Kinovaro	4.226	11.939	749 / 2.531	549 / 1.760	551 / 1.767	545 / 1.505	510 / 1.389	2.904	8.952
14	Marawola	11.123	32.672	631 / 2.185	745 / 2.468	715 / 2.432	865 / 2.594	894 / 2.686	3.850	12.365
15	Marawola Barat	2.310	5.848	914 / 2.611	327 / 866	249 / 641	199 / 501	156 / 362	1.845	4.981
Total	99.277	280.708	12.116 / 39.755	10.009 / 32.386	10.424 / 33.247	10.793 / 31.906	10.983 / 31.394	54.325 KK	168.688 Jiwa	

Apa Itu DESIL?

DESIL adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera:

- 1 Sangat Miskin
- 2 Miskin
- 3 Hampir Miskin
- 4 Rentan Miskin
- 5 Pas-pasan
- 6–10 Menengah ke Atas (Tidak Prioritas Bansos)

Pengaruh DESIL terhadap Penerima BANSOS

Program Keluarga Harapan (PKH)	Desil 1 – 4
Program Sembako (BPNT)	Desil 1 – 5
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)	Desil 1 – 5 (atau assemen)
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)	Desil 1 – 5 (atau assemen)
Bansos Lain dari Kemensos	

Kesimpulan:

- Desil 1 – 4 adalah kelompok paling berpeluang menerima semua jenis bansos.
- Desil 5 masih bisa menerima sebagian bantuan, tapi lebih terbatas.

Sumber data Bidang
Pemberdayaan

Dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sigi berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, inklusif, serta terlindungi dari berbagai risiko sosial, sejalan dengan program-program unggulan daerah seperti Sigi Masagena yang mengintegrasikan aspek ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi adalah melaksanakan penanganan masalah sosial secara komprehensif dan berkelanjutan yang meliputi pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dinas Sosial Kabupaten Sigi menerapkan Tujuan strategi Dinas Sosial pada table 3.5 berikut ini

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas SOSIAL Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2029

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang SIGI MASAGENA Perda Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	71	71,71	72,43	73,15	73,88	74,62	
		Meningkatnya Pemberdayaan, Sosial melalui PPKS	Persentase Keluargat miskin yang terpebuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial melalui PPKS	Presentase Keluarga yang terpebuhi kegutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial Bagi PPKS	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan Pembinaan kelembagaan melalui PSKS	Presentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	%	100	100	100	100	100	100	



3.2. Strategis Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial Kabupaten Sigi telah merumuskan tahapan strategi Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2026–2030. dengan menitikberatkan pada penguatan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis data. Renstra ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis. Strategi yang dirumuskan akan menjadi dasar dalam penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja, sehingga seluruh proses Kesejahteraan Masyarakat, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Sasaran Strategis Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sigi sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- Pengurangan angka kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat menjadi produktif secara ekonomi dan sosial.
- Pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan sosial dan program perlindungan sosial tepat sasaran
- Penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana.

2. Pemberdayaan sosial dan ekonomi

- Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga miskin dan rentan.
- Pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

3. Perlindungan dan jaminan Sosial.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

- Peningkatan perlindungan sosial melalui integrasi program jaminan kesehatan, pendidikan gratis bagi anak keluarga miskin, dan bantuan bencana.
 - Kolaborasi dengan BPJS dan lembaga terkait untuk memperluas akses layanan kesehatan dan perlindungan pekerja informal
4. Rehabilitasi Sosial dan penanganan Bencana.
- Penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi korban bencana, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya, termasuk pendirian dapur umum dan distribusi bantuan logistik saat terjadi bencana.
 - Pendampingan psikososial bagi korban bencana dan masyarakat terdampak masalah sosial
5. Penguatan tata kelola dan inovasi Sosial
- Penguatan tata kelola data dan sistem informasi kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas program dan transparansi penyaluran bantuan.
 - Inovasi program inklusi sosial, seperti Sekolah Rakyat dan pendidikan inklusif gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, sebagai bagian dari program unggulan Sigi Masagena

3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kab. Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi 2025-2029 difokuskan pada meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pengurangan angka kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat menjadi produktif secara ekonomi dan social, Pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan, Kolaborasi dengan BPJS dan lembaga terkait untuk memperluas akses layanan kesehatan dan perlindungan pekerja informal dan Inovasi program inklusi sosial, seperti Sekolah Rakyat dan pendidikan inklusif





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, sebagai bagian dari program unggulan Sigi Masagena

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Arah Kebijakan Nasioan mengacu pada Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas nasional seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan penguatan ketahanan bencana, Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen utama dalam penyusunan RPJMD, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosia, peningkatan partisipasi dan inklusivitas seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Sedangkan arah kebijakan propinsi mengacu pada, Mendukung penurunan kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di provinsi, Mengintegrasikan program prioritas provinsi ke dalam rencana pembangunan kabupaten, termasuk penguatan ketahanan pangan, pengembangan SDM, dan pelestarian budaya local dan Selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi berbasis wilayah



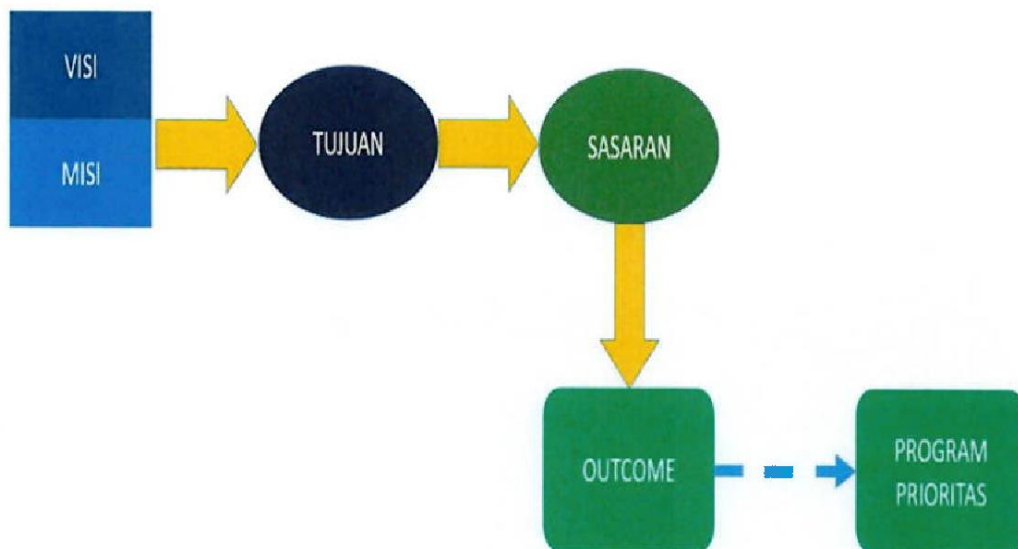


BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2029 diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, Kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang inklusif. Secara keseluruhan, program-program ini mengintegrasikan aspek perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Sosia 2026-2029.

Gambar 4.1. Karangka Perumusan Program / kegiatan Subkegiatan Renstra PD





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sigi tahun 2026-2029. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah dan sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian /Lembaga serta Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Tabel 4.1 Program dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.457.818.182,00		5.566.974.545,00		5.678.314.037,00		5.791.880.317,00		5.907.717.924,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.658.762.269,00		2.711.937.514,00		2.766.176.265,00		2.821.499.790,00		2.877.929.786,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	2.658.762.269,00	100	2.711.937.514,00	100	2.766.176.265,00	100	2.821.499.790,00	100	2.877.929.786,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	0	100	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	0	100	100		100		100		100		100		
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	-	100	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.599.055.913,00		1.631.037.031,00		1.663.657.772,00		1.696.930.927,00		1.730.869.546,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) di dalam panti (%)	0	100	100	1.599.055.913,00	100	1.631.037.031,00	100	1.663.657.772,00	100	1.696.930.927,00	100	1.730.869.546,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	0	100	100		100		100		100		100		
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	0	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Peranan Sosial (Indeks)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	100	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Rasio Gini (Indeks)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	0	100	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	-	100	100		100		100		100		100		
TOTAL KESELURUHAN					5.457.818.182		5.566.974.545		5.678.314.037		5.791.880.317		5.907.717.924	



4.2. Uraian Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2026-2029 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek Kemiskinan dan Perlindungan jaminan sosial, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Fokus utama adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang inklusif, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antar berbagai sektor dan stakeholders.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Rencana program kegiatan Dinas Sosial selama lima tahun (2026-2029) di Kabupaten Sigi umumnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program strategis, yang diimplementasikan berdasarkan arah kebijakan daerah dan nasional. Program-program utama yang biasanya tercakup dalam rencana strategis tersebut meliputi :

1. Pengentasan kemiskinan dan penanganan fakir miskin, termasuk penyaluran bantuan sosial, pendataan terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat rentan, melalui pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), serta pengembangan usaha ekonomi produktif.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

3. Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
4. Rehabilitasi sosial dan penanganan korban bencana, termasuk pendampingan psikososial dan bantuan pemulihan sosial ekonomi.
5. Penguatan tata kelola data kesejahteraan sosial, untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi program secara efektif dan transparan.
6. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaan program sosial untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi 2026-2029 dan arahan kebijakan nasional serta provinsi Sulawesi Tengah, termasuk integrasi isu gender dan inklusivitas kelompok rentan agar pembangunan sosial lebih merata dan adil. Tim menyusun dokumen Renstra yang memuat sasaran, program, kegiatan, serta indikator output dan outcome sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi selama lima tahun ke depan.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Bapperida Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2029, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial							
- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif	meningkatnya pemberdayaan sosial melalui PPKS	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
					Persentase keluarga miskin yang meningkat ekonominya secara mandiri (%)		
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Jumlah KK KAT yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01.0004 - Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	
				Jumlah KK KAT Yang Meningkatkan Kapasitas dan Mendapatkan Pendampingan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Sosial Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial melalui PPKS	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Gelandang dan engemis yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Peranan Sosial (Indeks)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang di Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1.06.04.2.02.0009 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Rasio Gini (Indeks)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Kesehatan Pendidikan dan tempat tinggal yang sesuai dengan standar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
					presentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat sesuai prosedur	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Persentase Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas pelayanan Sosial bagi PPKS	Meningkatnya Layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Persentase Layanan Sosial bagi PPKS (%)		
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Peranan Sosial (Indeks)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanaan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang di Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanaan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0009 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Rasio Gini (Indeks)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Kesehatan Pendidikan dan tempat tinggal yang sesuai dengan standar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				presentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat sesuai prosedur	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase Pelaksanaa Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
		Meningkatkan pembinaan kelembagaan melalui PPKS	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS (%)			
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Jumlah KK KAT yang mendapat Program Pemberdaayaan Sosial	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01.0004 - Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	
				Jumlah KK KAT Yang Meningkatkan Kapasitas dan Mendapatkan Pendampingan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Sosial Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
		Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan		Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.06.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.06.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dinas Sosial Kabupaten Sigi melaksanakan berbagai subkegiatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Salah satu program unggulan adalah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak terlantar dan lansia terlantar, yang bertujuan memberikan layanan dasar dan pendampingan agar mereka dapat mandiri secara sosial dan ekonomi. Selain itu, pendataan dan verifikasi data sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan akurat.

Indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Sigi mencakup persentase penyelesaian validasi dan pembaruan data sosial lembaga dan penerima manfaat, jumlah PMKS yang terlayani sesuai kebutuhan program rehabilitasi, dan capaian bantuan sosial yang tersalurkan tepat waktu. Program pemberdayaan ekonomi juga menjadi subkegiatan signifikan, melalui penguatan kelompok usaha bersama (KUBE) dan program sosial usaha produktif, yang diukur dari jumlah kelompok yang mendapat pendampingan dan dukungan modal, serta peningkatan pendapatan kelompok. Indikator ini membantu mengukur efektivitas program kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Sigi juga fokus pada kebijakan inklusi sosial melalui pembangunan regulasi seperti Perda kesejahteraan lansia dan perlindungan penyandang disabilitas. Program ini meliputi pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan bagi kelompok rentan, dengan target membangun ekosistem yang mendukung kesejahteraan lansia dan disabilitas agar lebih produktif dan sejahtera. Pendekatan ini didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian sosial, termasuk program inovatif seperti Sekolah Rakyat dan Sigi Masagena yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan dan perlindungan sosial yang layak.

Berikut Tabel rencana Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif:





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.457.818.182,00		5.566.974.545,00		5.678.314.037,00		5.791.880.317,00		5.907.717.924,00			
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.658.762.269,00		2.711.937.514,00		2.766.176.265,00		2.821.499.790,00		2.877.929.786,00			
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	2.658.762.269,00	100	2.711.937.514,00	100	2.766.176.265,00	100	2.821.499.790,00	100	2.877.929.786,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	1		1		1		1		1				
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	3		3		3		3		3				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	5		5		5		5		5				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokume	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00		
1.06.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.368.762.269,00		2.421.937.514,00		2.476.176.265,00		2.531.499.790,00		2.587.929.786,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	2.368.762.269,00	1	2.421.937.514,00	1	2.476.176.265,00	1	2.531.499.790,00	1	2.587.929.786,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	32		32		32		32		32			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.318.762.269,00		2.371.937.514,00		2.426.176.265,00		2.481.499.790,00		2.537.929.786,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	32	2.318.762.269,00	32	2.371.937.514,00	32	2.426.176.265,00	32	2.481.499.790,00	32	2.537.929.786,00		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.06.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1			
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		15	46.000.000,00	15	46.000.000,00	15	46.000.000,00	15	46.000.000,00	15	46.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	21		21		21		21					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1					
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	21	10.000.000,00	21	10.000.000,00	21	10.000.000,00	21	10.000.000,00	21	10.000.000,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	0	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	00 - Dinas Sosial	
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	0	100		100		100		100		100			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	0	100		100		100		100		100			
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	-	100		100		100		100		100			
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				100.000.000,00		106.000.000,00		112.120.000,00		118.362.400,00		124.729.648,00		
Jumlah KK KAT yang mendapat Program Pemberdaayaan Sosial	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		50	90.000.000,00	34	96.000.000,00	41	102.120.000,00	70	108.362.400,00	50	114.729.648,00		
1.06.02.2.01.0004 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan				90.000.000,00		96.000.000,00		102.120.000,00		108.362.400,00		114.729.648,00		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	-	50	90.000.000,00	34	96.000.000,00	41	102.120.000,00	70	108.362.400,00	50	114.729.648,00		
Jumlah KK KAT Yang Meningkatkan Kapasitas dan Mendapatkan Pendampingan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		50	10.000.000,00	34	10.000.000,00	41	10.000.000,00	70	10.000.000,00	50	10.000.000,00		
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		50	10.000.000,00	34	10.000.000,00	41	10.000.000,00	70	10.000.000,00	50	10.000.000,00		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)		2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)		34	30.000.000,00	34	30.000.000,00	34	30.000.000,00	34	30.000.000,00	34	30.000.000,00		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)		34	30.000.000,00	34	30.000.000,00	34	30.000.000,00	34	30.000.000,00	34	30.000.000,00		
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)		10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)		10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00		
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00		
Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		
Meningkatnya Layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)		100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	1.06.0.00.0.00.01.00	
	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)		100		100		100		100		100			
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		
Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	300.000.000,00	4	306.000.000,00	4	312.120.000,00	2	318.362.400,00	2	324.729.648,00		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	300.000.000,00	4	306.000.000,00	4	312.120.000,00	2	318.362.400,00	2	324.729.648,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.599.055.913,00		1.631.037.031,00		1.663.657.772,00		1.696.930.927,00		1.730.869.546,00		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	0	100	1.599.055.913,00	100	1.631.037.031,00	100	1.663.657.772,00	100	1.696.930.927,00	100	1.730.869.546,00	1.06.0.00.0.00.01.00	
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	0	100		100		100		100		100			
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti (%)	0	100		100		100		100		100			
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	0	100		100		100		100		100			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi	0	100		100		100		100		100			
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)	-	100		100		100		100		100			
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	-	100		100		100		100		100			
	Indeks Peranan Sosial (Indeks)	-	100		100		100		100		100			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				815.055.913,00		815.168.436,00		815.229.177,00		815.362.332,00		815.400.951,00		
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	10	815.055.913,00	8	815.168.436,00	8	815.229.177,00	7	815.362.332,00	7	815.400.951,00		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		6		6		6		6		6			
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100		80		80		70		70			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100		80		80		70		70			
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5		4		4		3		3			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50		40		40		30		30			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100		90		90		90		80			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		30		28		28		26		26			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		25		15		15		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50		40		40		30		30			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5		4		4		3		3			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100		95		95		90		90			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				50.055.913,00		50.168.436,00		50.229.177,00		50.362.332,00		50.400.951,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100	50.055.913,00	90	50.168.436,00	90	50.229.177,00	90	50.362.332,00	80	50.400.951,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										150.000.000,00				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100	150.000.000,00	95	150.000.000,00	95	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		25	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		30	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	26	30.000.000,00	26	30.000.000,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial				784.000.000,00		815.868.595,00		848.428.595,00		881.568.595,00		915.468.595,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang di Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	5	784.000.000,00	5	815.868.595,00	3	848.428.595,00	3	881.568.595,00	3	915.468.595,00		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10		10		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)		2		2		2		2		2			
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100		100		80		80		80				
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5		5		3		3		3				
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10		10		10		10		10				
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5		5		5		5		5				
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20		20		18		18		18				
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		8		8		8				
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	50		50		40		40		40				
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		100		100		100		100				
Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	75		75		70		70		70				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	0	125		100		90		90		80			
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	0	125				90		80					
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		75	50.000.000,00	75	50.000.000,00	70	50.000.000,00	70	50.000.000,00	70	50.000.000,00		
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	3	55.000.000,00	3	55.000.000,00	3	55.000.000,00		
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				100.000.000,00		100.000.000,00						100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		125	100.000.000,00	100	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	80	100.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota (Orang)Kewenangan	0	125	100.000.000,00	100	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kela Identitas Anak, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terperuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	18	30.000.000,00	18	30.000.000,00	18	30.000.000,00		
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00		
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				124.000.000,00		155.868.595,00		188.428.595,00		221.568.595,00		255.468.595,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	124.000.000,00	2	155.868.595,00	2	188.428.595,00	2	221.568.595,00	2	255.468.595,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)		100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	1.06.0.00.0.00.01.00	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)		100		100		100		100					
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)		100		100		100		100		100			
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	-	100		100		100		100		100			
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	-	100		100		100		100		100			
	Rasio Gini (Indeks)	-	100		100		100		100		100			
	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Kesehatan Pendidikan dan tempat tinggal yang sesuai dengan standar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	66.242.400,00	10	72.609.648,00		
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak- Anak Terlantar				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		31.242.400,00			31.269.648,00
Terlaksananya Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	31.242.400,00	10	31.269.648,00		
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		16.340.000,00		
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	16.340.000,00		
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				240.000.000,00		246.000.000,00		252.120.000,00		252.120.000,00		252.120.000,00		
presentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200	240.000.000,00	200	246.000.000,00	200	252.120.000,00	200	252.120.000,00	200	252.120.000,00		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100		100		100		100		100			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0	100		100		100		100		100		100		
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00			
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)		100	20.000.000,00	100	26.000.000,00	100	26.000.000,00	100	26.000.000,00	100	26.000.000,00			
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00			
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00			
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		26.120.000,00		26.120.000,00		26.120.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)		100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	26.120.000,00	100	26.120.000,00	100	26.120.000,00			
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00			
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	0	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	318.362.400,00	100	324.729.648,00	1.06.0.00.0.00.01.00		
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)		100		100		100		100						
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)		100		100		100		100						
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Be Kabupaten/Kotancana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				230.000.000,00		236.000.000,00		242.120.000,00		248.362.400,00		248.362.400,00			
Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat sesuai prosedur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		500	230.000.000,00	400	236.000.000,00	400	242.120.000,00	300	248.362.400,00	300	248.362.400,00			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50		40		40		30		30				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2	1.000	2	800	2	800	2	700	2	700		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		1.000		800		800		700		700			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		30		25		25		20		20			
	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan			65.000.000,00		71.000.000,00		77.120.000,00		83.362.400,00		83.362.400,00		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		1.000	65.000.000,00	800	71.000.000,00	800	77.120.000,00	700	83.362.400,00		83.362.400,00		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		500	65.000.000,00	400	65.000.000,00	400	65.000.000,00	300					
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		30	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		50.000.000,00	20	50.000.000,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpenuhi Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00		30.000.000,00	30	30.000.000,00		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		76.367.248,00		
Persentase Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)		3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	76.367.248,00		
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		15		15		15		15		15			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026	2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)		3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		41.367.248,00		
Terperuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		15	35.000.000,00	15	35.000.000,00	15	35.000.000,00	15	35.000.000,00	15	41.367.248,00		



4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis kondisi daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah, musrenbang, serta penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Pentingnya penguatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah juga menjadi prioritas dalam sub kegiatan ini. Dengan meningkatkan kapasitas Ekonomi dan pengembangan yang berbasis bukti, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap permasalahan daerah dan potensi unggulan yang ada.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan, dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, analisis data, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.



Tabel 4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	ASTACITA/PRIORITAS
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	ASTACITA/PRIORITAS
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	ASTACITA/PRIORITAS
2.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

			1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
3.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	ASTACITA/PRIORITAS/
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	ASTACITA/PRIORITAS
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	ASTACITA/PRIORITAS
4.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
			1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Dinas Sosial Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. IKU Dinas Sosial sangat penting dalam memastikan program-program sosial berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapannya meliputi seluruh siklus manajemen kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan, sehingga pelayanan sosial kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 mencakup satu indikator utama, yaitu Indeks Kesejahteraan sosial mengukur kualitas dan keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan, baik dari aspek pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis dan efektivitas program-program Dinas Sosial. IKU dirancang agar kinerja Dinas Sosial dapat diukur secara objektif, terarah, dan sistematis, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan public.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas pemberdayaan Sosial dan penerapan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA
Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	71	71,71	72,43	73,15	73,88	74,62	
3.	Persentase keluarga miskin yang meningkat ekonominya secara mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian yang sangat vital untuk memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan serta program pembangunan daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur seberapa baik kinerja setiap elemen yang terlibat dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan inovasi di tingkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selain itu, penekanan pada Pemberdayaan Kesejahteraan sosial sebagai bagian dari Penanggulangan kemiskinan potensi unggulan daerah



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2030

menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Dengan menggunakan IKK ini, Dinas Sosial Kabupaten Sigi akan dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) RENSTRA
Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	komulatif	Indeks	-	71	71,71	72,43	73,15	73,88	74,62	
3.	Persentase keluarga miskin yang meningkat ekonominya secara mandiri	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB. V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2025-2029 ini merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Renstra ini telah disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan kebijakan pembangunan daerah serta sinergi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi 2025-2029.

Menegaskan komitmen Dinas Sosial untuk melaksanakan seluruh rencana program dan kegiatan secara optimal, disertai kesadaran akan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi sehingga diperlukan kerja sama dan dukungan dari semua pihak terkait mulai pemerintah daerah, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Sosial menjadi pedoman yang efektif dalam memandu langkah strategis menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, menjunjung nilai inklusivitas dan sinergi antar sektor, serta mengajak semua pihak berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial demi kemajuan pembangunan sosial daerah

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 ini disusun sebagai acuan kerja yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sigi Kota, 30 September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIGI



ARIYANTO, S.STP
Pembina Tkt. I (Pw/b)

Nip. 19820811 2001121 001



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

#KEMENSOS
Hadir